

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) sering disebut sebagai Pesta Demokrasi yang dilakukan sebuah negara. Dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi, Pilkada menjadi salah satu kunci terciptanya demokrasi. Di Indonesia, Pilkada menjadi mekanisme demokrasi daerah yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk menentukan pemimpin secara langsung melalui proses pemungutan suara. Kedaulatan rakyat tercermin melalui pelaksanaan Pilkada sebagai sarana bagi masyarakat untuk memilih pihak yang akan memimpin serta menjalankan pemerintahan di daerah. Pilkada berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Sholeha & Herawati, 2024). Dalam hal ini, masyarakat menjadikan Pemilihan Kepala Daerah sebagai suatu sarana memilih pemimpin di daerah. Masyarakat berkesempatan memilih pemimpin mereka dan memutuskan apa yang pemerintah lakukan untuk mereka serta keputusan ini menentukan hak yang mereka miliki (KPU, 2024). Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 Ayat (8) yang menyebutkan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024 (Nabela & Arfa'i, 2023).

Keberhasilan Pilkada tidak hanya terletak pada penyelenggaraan yang transparan dan adil, tetapi juga bergantung pada tingkat kesadaran politik masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran politik masyarakat, semakin besar pula partisipasi politik dalam menjaga kualitas demokrasi. Partisipasi politik mempunyai peran penting dalam proses Pilkada. Salah satu cara dalam Sosialisasi politik santri adalah melalui pendidikan politik dan bertanggung jawab untuk menyediakan informasi serta pendidikan politik kepada masyarakat. Jenis pemilih yang perlu diperhatikan tingkat partisipasi politik pemilihnya yaitu para pemilih pemula. Hal ini disebabkan karena pemilih pemula menggunakan hak pilih lagi pada Pilkada tahun 2024 (Gleko et al., 2017).

Segmentasi pemilih yang menarik adalah pemilih pemula, karena pemilih

Pemula merupakan warga negara yang baru menggunakan hak pilihnya pertama kali atau pernah satu kali menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Menurut UU RI nomor 40 tahun 2009 pasal 1 ayat 1, pemuda adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 sampai 30 tahun. Sebagian besar pemilih Pemula berasal dari golongan pelajar, mahasiswa dan pekerja muda. kelompok ini selalu bersentuhan dan mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, sehingga pemilih muda memiliki sifat terbuka untuk mempelajari suatu Konteks yang dianggap menarik dan hal-hal yang baru (Farzianto & Rafni, 2020)

Pemilih pemula memiliki posisi yang penting dalam pelaksanaan Pilkada karena turut memberikan kontribusi suara dalam proses pemilihan. mereka dalam Pemilihan Kepala Daerah. Pemilih pemula umumnya terdiri dari individu yang masih berusia 17-21 tahun, termasuk pelajar atau mahasiswa. Pemilih dengan usia tersebut biasanya mampu menghadirkan beberapa keunikan yang tidak terduga dalam pilihan politiknya. Keunikan tersebut hadir karena mereka mempunyai antusias yang tinggi, pemikiran yang lebih rasional dan sangat menginginkan perubahan. Kaum muda sebagai pemilih pemula memiliki karakteristik yang cenderung dinamis dan independen, sehingga sering dianggap sebagai kelompok yang tidak mudah dipengaruhi maupun dijangkau oleh partai politik ataupun peserta Pilkada. Namun, di sisi lain literasi politik pada kalangan muda masih terbilang rendah sehingga mereka cenderung dapat terpengaruh oleh lingkungan di sekitarnya dan juga media massa (Sentosa & Karya, 2022)

Salah satu bagian dari kaum muda atau pemilih pemula adalah kaum santri sebagai kekuatan sosial dan politik yang selalu diperhitungkan, sehingga pondok pesantren sering kali menjadi incaran partai politik dengan tujuan untuk menggalang suara. Akan tetapi, tidak semua pesantren terlibat dalam urusan politik praktis. Hal ini tergantung dengan bagaimana pola kepemimpinan kiai sebagai tokoh sentral di pesantren tersebut. Ditambah lagi dengan kultural keislaman di pesantren yang menekankan prinsip *sami'na wa athokna* menjadi kesempatan bagi para kontestan dan partai politik untuk menarik suara dari para santri. Prinsip tersebut mengakibatkan pilihan politik santri cenderung dipengaruhi oleh kiai atau guru-guru di sana (Marnanda, 2025)

Santri sebagai pemilih pemula memiliki perbedaan dengan pemilih pemula secara umum. Hal ini dikarenakan santri terikat oleh peraturan yang berada di

pondok pesantren. Peraturan ini pada dasarnya dibuat untuk mendidik para santri agar menjadi disiplin dan mandiri. Akan tetapi, peraturan-peraturan yang ada di pondok pesantren kerap kali mengikat santri sehingga tidak memiliki kebebasan sebagaimana remaja pada umumnya untuk menggali informasi terkait pemilihan umum ataupun isu-isu politik lainnya. Akibatnya, para santri akan bersikap apatis atau acuh tak acuh terhadap lingkungan sekitarnya, termasuk dalam hal urusan politik. Sikap apatis ini mengakibatkan santri menjadi tidak tertarik atau tidak berminat terhadap fenomena perpolitikan dan pemilihan yang terjadi di Indonesia sehingga menjadi penyebab timbulnya angka golput. Selain itu, faktor lain yang menyebabkan banyaknya angka “golput” adalah faktor keterbatasan informasi yang diperoleh santri dalam pondok pesantren. Minimnya informasi yang didapatkan oleh para santri bisa dikarenakan kurangnya sosialisasi politik dan kurang optimalnya pendidikan politik yang mereka dapatkan di pesantren, sehingga santri cenderung masih buta terhadap pilihan politiknya, terutama untuk menghadapi Pilkada 2024 (MTY, 2014). Oleh karena itu, perlu adanya orientasi politik yang terdapat pada diri santri sebagai Pemilih Pemula.

Dalam pemilihan Pilkada 2024, orientasi kognitif berkaitan dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman serta kepercayaan dan kesadaran santri terhadap Pilkada yang diselenggarakan pada tahun 2024. Orientasi afektif menyangkut perasaan santri terhadap Pilkada dan perasaan yang dapat membuatnya menerima atau menolak sesuatu. Orientasi afektif ini biasanya dapat berupa sikap positif santri terhadap Pilkada yang ditunjukkan dengan keinginan untuk berpartisipasi dalam Pilkada yang diselenggarakan, orientasi evaluatif mencakup keputusan atau pilihan politik santri sebagai pemilih pemula dalam Pilkada yang diselenggarakan. Pada intinya, orientasi ini berkaitan dengan kesadaran politik dan perilaku pemilih. Orientasi Politik dan kesadaran Politik juga sangat dipengaruhi Oleh Kontestasi Politik Lokal daerah.

Dalam kontestasi politik lokal daerah, Madura sebagaimana juga daerah-daerah lain di Indonesia menjadi ajang kontestasi otoritas dan ideologi politik dari para elite kelompok. Ada beragam kelompok yang turut berkontestasi dalam politik lokal di Madura, mulai dari kiai, politisi, pemodal hingga para blater (Halim, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa Madura merupakan sebuah arena kontestasi kekuasaan yang intensitasnya cukup tinggi. Sebagai sebuah kumpulan etnik dengan

sistem tradisi dan kulturalnya yang khas dan berbeda dengan etnik lain, masyarakat Madura juga menampilkan keunikan-keunikan dalam praktik politik, yang tidak dijumpai di daerah lain. Meski demikian tetap ada banyak kesamaan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Satu hal yang menarik adalah karena Madura termasuk daerah yang masih kuat otoritas tradisionalnya. Di sini peran kiai sangat kuat, begitu juga blater. Otoritas tradisional dan karismatik masih sangat mendominasi dan menentukan dalam kehidupan masyarakat Madura, termasuk dalam praktik dan tindakan politik. Seperti dijelaskan oleh Kuntowijoyo bahwa tokoh agama di Madura terbagi menjadi tiga, yaitu santri, kiai, dan haji. (Rahman, 2022).

Kabupaten Bangkalan sebagai salah satu daerah di Pulau Madura memiliki karakteristik sosial-politik yang berbeda dengan banyak daerah lain di Indonesia. Selain dikenal sebagai daerah yang memiliki jumlah pondok pesantren cukup besar, Bangkalan juga memiliki budaya masyarakat yang masih menempatkan kiai sebagai figur sentral dalam kehidupan sosial, keagamaan, dan politik. Kondisi tersebut menyebabkan proses pembentukan orientasi politik masyarakat, termasuk santri sebagai pemilih pemula, tidak hanya dipengaruhi oleh lembaga formal seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), tetapi juga oleh interaksi sosial yang berlangsung di lingkungan pesantren. Di sisi lain, pesantren memiliki aturan yang membatasi akses santri terhadap berbagai sumber informasi, sehingga pendidikan politik yang diterima santri lebih banyak diperoleh melalui lingkungan internal pesantren. Situasi ini menjadikan pesantren sebagai kelompok masyarakat yang memiliki karakteristik khusus dan memerlukan pendekatan sosialisasi politik yang berbeda dibandingkan dengan pemilih pemula pada umumnya.

Dalam penyelenggaraan Pilkada 2024, KPU Kabupaten Bangkalan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pendidikan pemilih dan sosialisasi politik kepada seluruh kelompok masyarakat, termasuk santri sebagai pemilih pemula. Akan tetapi, berdasarkan hasil observasi awal peneliti, pelaksanaan sosialisasi politik di lingkungan pesantren masih menghadapi berbagai tantangan. Sosialisasi yang dilakukan KPU belum dapat menjangkau seluruh pesantren, sementara intensitas kegiatan sosialisasi juga masih terbatas. Di sisi lain, kuatnya budaya kepesantrenan menyebabkan informasi politik yang disampaikan oleh KPU harus bersaing dengan nilai, tradisi, dan pola komunikasi yang telah berkembang di lingkungan pesantren. Kondisi tersebut menunjukkan adanya dinamika antara

pendekatan formal yang digunakan KPU dengan struktur sosial dan budaya pesantren yang lebih mengedepankan hubungan personal dan otoritas kiai.

Penelitian mengenai sosialisasi politik kepada pemilih pemula pada umumnya lebih banyak membahas pelajar sekolah atau mahasiswa, sedangkan penelitian yang secara khusus mengkaji santri sebagai pemilih pemula masih relatif terbatas. Demikian pula, kajian mengenai sosialisasi politik oleh KPU lebih sering berfokus pada efektivitas program secara umum tanpa mengkaji bagaimana proses sosialisasi tersebut berlangsung dalam lingkungan pesantren yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang khas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk menjelaskan dinamika sosialisasi politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bangkalan kepada santri sebagai pemilih pemula, sekaligus menganalisis bagaimana karakteristik budaya pesantren memengaruhi proses penerimaan dan pembentukan perilaku politik santri.

Penelitian ini menggunakan Teori Asosiasi Diferensial yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland sebagai landasan analisis. Meskipun teori ini pada awalnya dikembangkan untuk menjelaskan pembentukan perilaku melalui proses pembelajaran sosial dalam kajian kriminologi, konsep dasarnya relevan digunakan untuk memahami pembentukan perilaku politik. Menurut Sutherland, perilaku individu dipelajari melalui interaksi sosial yang berlangsung secara terus-menerus dengan kelompok yang memiliki hubungan dekat (*primary group*). Dalam konteks penelitian ini, perilaku politik santri dipahami sebagai hasil proses pembelajaran yang diperoleh melalui interaksi dengan kiai, ustaz, teman sesama santri, keluarga, maupun KPU sebagai agen sosialisasi politik formal. Dengan menggunakan perspektif tersebut, penelitian ini tidak hanya menganalisis pelaksanaan sosialisasi politik oleh KPU Kabupaten Bangkalan, tetapi juga menjelaskan bagaimana lingkungan sosial pesantren membentuk orientasi dan perilaku politik santri sebagai pemilih pemula pada Pilkada 2024.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana dinamika sosialisasi politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bangkalan kepada santri sebagai pemilih pemula pada Pilkada 2024, faktor-faktor yang memengaruhi proses sosialisasi tersebut, serta implikasinya terhadap pembentukan kesadaran dan partisipasi politik santri. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan

strategi sosialisasi politik yang lebih kontekstual, adaptif, dan sesuai dengan karakteristik budaya pesantren sehingga pendidikan politik kepada pemilih pemula dapat berlangsung secara lebih efektif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan Latar belakang di atas, maka rumusan dari penelitian ini adalah :

Bagaimana dinamika Sosialisasi pemilih pemula pada santri Pondok Pesantren Oleh KPU Kabupaten Bangkalan Pada pilkada 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui dan menganalisa Sosialisasi Pemilih pemula pada santri Pondok Pesantren oleh KPU Kabupaten Bangkalan Pada pilkada 2024.

1.4 Manfaat Teoritis

- A. Penelitian ini selain menambah pengalaman bagi penulis saat di lapang, juga dapat berguna bagi pengembangan pengetahuan penelitian sejenis di masa yang akan datang
- B. Untuk menambah wawasan tentang pemilih Pemula pada Pilkada selanjutnya

1.5 Manfaat praktis

Hasil penelitian ini sebagai sumbangan ilmu dan bahan tinjauan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan Dalam Upaya Sosialisasi Pemilih Pemula di Masyarakat Kabupaten Bangkalan , Khususnya Pada kalangan pondok Pesantren serta memberikan masukan bagi KPU Bangkalan dan pihak terkait untuk merancang optimalisasi yang efektif dalam mendorong partisipasi politik masyarakat